



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS P3AP2 DAN KB KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas P3AP2 & KB Kabupaten Tegal Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas P3AP2 & KB Kabupaten Tegal	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB	36
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2 dan KB	42
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	43
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	66
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas P3AP2 dan KB	68
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran Tahun 2019	9
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019	12
Tabel 2.3.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal s/d Tahun 2019.....	24
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal	37
Tabel 2. 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Tegal	44
Tabel 2. 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Tegal	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tegal, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPPA, BKKBN dan Renja Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renja Dinas P3AP2 dan KB Tahun 2021 didasarkan pada Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal 2019-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal yang berpedoman pada RPJMD 2019-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024;
- l. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024;
- x. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024;

- y. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja SKPD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2 DAN KB TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPd dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS P3AP2 & KB KAB. TEGAL

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS P3AP2 DAN KB

Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja Dinas P3AP2 dan KB

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

Dinas P3AP2 dan KB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah tercapai pada Tahun 2019 dan pencapaian target tahun berjalan serta perkiraan target tahun 2021. Dari kegiatan Tahun 2020 (sampai dengan triwulan II) yang telah di laksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) yang pencapaiannya fisiknya diatas 50 % , sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang capaian penyelesaian fisiknya antara 20 % sampai dengan 50%, dan 6 kegiatan capaian penyelesaian fisiknya di bawah 10 %.
- b. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan baru tercapai 10,32% .

Adapun hasil kegiatan selama Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.1 (T-C.29) :

Tabel 2.1
Hasil Capaian Rencana dan Target Kegiatan 2020 sd Triwulan II

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
A	2.02 . 2.02.01 . 04	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.979.125.000,-	50%	516.250.574,-	49.52	36.88
1	2.02 . 2.02.01 . 04 . 01	Penyediaan Jasa kantor	Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa kantor Honor PHL, Jasa komunikasi sum ber daya air dan listrik, Bahan bacaan, Jasa keamanan dan kebersihan kantor, jasa administrasi ke uangan, penggandaan dan cetakan, ATK serta publikasi program/kegiatan	460 buah, 12 bulan, 12 bulan, 5 buku, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 58.586 lbr, 7 jenis, 51 jenis, 12 bulan	337.328.000,-	460 bh, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 8000 lbr, 3 bulan	102.872.687,-	40,00	30.50
2	2.02 . 2.02.01 . 04 . 02	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya makan an dan minuman rapat PD, terpenuhinya pelaksanaan rakor dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan, 12 bulan	79.950.000,-	6 bulan, 6 bulan	44.921.519,-	56.19	61.43
3	2.02 . 2.02.01 . 04 . 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasanara Kantor	Terpenuhinya pemeli haraan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/ berkala	6 jenis, 8 jenis, 5 jenis, 9 jenis, 12	216.287.000,-	6 jenis, 8 jenis, 5 jenis, 9 jenis, 12	53.771.618,-	38.41	24.86

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			gedung kantor, kendaraan dinas, distribusi alkon dan peralatan rumah tangga	bulan, 28 jenis		bulan, 28 jenis			
4	2.02 . 2.02.01 . 04 . 05	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan evaluasi kinerja PD yang disusun	4 dokumen	18.738.000,-	2 dokumen	6.246.750,-	33,34	33,34
5	2.02 . 2.02.01 . 04 . 06	Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah	Honorarium penatausahaan keuangan dan BMD	12 bulan	51.000.000,-	6 bulan	0,-	50,00	0,-
6	2.02 . 2.02.01 . 04 . 07	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan AC dan perlengkapan gedung kantor (Amplifier, UHF Wireless tuner, UHF Handfield Wireles microphone, speaker, Delegate unit, Central unit, Station Extension cord, Standar microphone unit)	6 buah, 1 buah, 1 buah, 1 buah, 1 buah, 2 buah, 2 buah, 1 buah, 1 buah, 2 buah	83.758.000,-	6 buah, 1 buah, 1 buah, 1 buah, 1 buah, 2 buah, 2 buah, 1 buah, 1 buah, 2 buah	82.992.000,-	100,00	99,09
7	2.02 . 2.02.01 . 04 . 08	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	ASN yang mengikuti Diklat/Bintek, ASN yang melaksanakan PAK	50 orang, 2 periode	17.790.000,-	10 org	5.752.000,-	41,33	32,33
8	2.02 . 2.02.01 . 04 . 10	BOKB (DAK) kesekretariatan	Terpenuhinya Honorarium Petugas Keamanan/THL SKPD, Operasional untuk Balai	12 bln, 7 jenis, 13 jenis, 12 bulan, 12 bulan, 12	1.174.274.000,-	6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 18 paket	219.694.000,-	29,62	18,71

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			Penyuluhan / ATK UPTD, Operasional untuk Balai Penyuluhan / ATK Dukungan Manajemen, Jasa Telepon dan Internet untuk UPTD, Jasa Air untuk UPTD, Jasa Listrik untuk UPTD, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Printer dan Komputer/PC, Pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB	bulan, 36 buah, 144 paket					
B	2.02 . 2.02.01 . 19	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase pencapaian keadilan dan kesejahteraan Gender (APE)	72%	213.055.000,-	50%	10.725.000,-	57.46	5.11
1	2.02 . 2.02.01 . 19.02	Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup	Rapat koordinasi PPT, Rapat penanganan kasus, Pelatihan Penanganan kasus, Pelatihan advokasi dan konseling, Pelatihan penguatan kapasitas keluarga miskin, BinteK revitalisasi GSI, Rakor satgas penanganan perempuan dan anak	2 kali, 12 kali, 1 keg, 1 keg, 2 keg, 1 keg, 1 kali	105.004.000,-	1 kali, 3 kali, 1 keg	10.725.000,-	10,21	10,21
2	2.02 . 2.02.01 . 19.03	Pengarusutamaan gender	BinteK program dan kebijakan responsive	60 org, 3 keg, 5	108.051.000,-	1 keg, 1 keg	0,-	54.81,-	0,-

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			gender, pelatihan PPRG, Monev perencana OPD, Pelatihan data pilah gender, Masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender, peringatan Hari Kartini, Hari ibu, HUT dan HBH DWP, Sosialisasi KKG pada, GOW, dan TP PKK, Laporan data pilah, buku profil gender	OPD, 2 keg, 50 orang, 4 kali, 5 kali, 35 buku, 25 buku					
C	2.02 . 2.02.01 . 20	Program Perlindungan Anak	Persentase pencapaian pemenuhan Hak Anak	55%	93.731.000	50%	58.072.100,-	56.15	100,-
1	2.02 . 2.02.01 . 20.01	Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	Pembinaan KELANA, pembentukan DELANA, peningkatan kapasitas Forum anak Kab, pembinaan Forum anak kec, Pembentukan Forum Anak Desa, Rakor Gugus Tugas KLA, Rakor jejaring KLA	4 kec, 10 desa, 1 keg, 4 kec, 20 desa, 4 keg, 4 keg	24.474.000	1 keg	10.764.900	100.00	43,99
2	2.02 . 2.02.01 . 20.02	Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pencegahan kekerasan pada anak, data pilah anak, pelatihan ketahanan keluarga responsive anak, pelatihan KHA, Pembinaan TPA, Pemb	2 keg, 1 dokumen, 4 keg, 2 keg, 20 lokasi, 3 kec, 3 kec, 2 keg, 5	69.257.000	1 keg	47.307.200	100.00	68,31

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			tukan PATBM, Pelatih an satgas Perlindung an Anak, Sosialisasi SRA, Sosialisasi pe nerapan disiplin positif, pelatihan tenaga KHA	lokasi, 120 org					
D	2.08 . 2.02.01 . 26	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	LPP, TFR, Ketahanan Keluarga	26; 2,44 ; 48%	3.122.918.000	50%	249.379.500	55.70	13.86,-
1	2.08 . 2.02.01 . 26.01	Data dan Informasi	Pengumpulan data, dokumen hasil analisis data, pelatihan pengumpulan data, rapat evaluasi KKBPK, sosialisasi pendataan keluarga dan pelatihan pendataan keluarga	12 bulan, 12 buku, 1 kali, 1 kali, 2 kali	45.536.000	6 bulan, 6 buku, 1 kali	4.095.000	37,85	8,99
2	2.08 . 2.02.01 . 26.02	Parameter, Analisa, Advokasi dan pengendalian Pendudukan	Sekolah menengah yang melaksanakan SSK, Pembentukan SSK, kemitraan dengan sector terkait dalam pengendalian penduduk, rapat koalisi kependudukan, rakor FAPSEDU, sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan, rapat grand design	1 SSK, 4 SMA, 3 OPD, 2 keg, 2 keg, 4 SMA, 1 keg, 1 keg, 2 keg	22.000.000	1 keg rakor Fapsedu	0,-	4.20	0,-

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
3	2.08 . 2.02.01 . 26.04	Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Jumlah kader BKR percontohan yang dilatih, kader BKL yang dilatih keterampilan, Kader pokja II dan IV PKK yang dilatih BKB Posyandu PADU, Kader posdaya yang dimonev, Kaber BKB yang dilatih tumbuh kembang anak, Persentase pengembangan poktan ekonomi Produktif, Kader UPPKS dilatih	54 org, 54 org, 54 org, 54 org, 1 klpk, 54 org, 54 org	57.900.000	54 org	11.960.000	34,77	20,66
4	2.08 . 2.02.01 . 26.05	Institusi Masyarakat dan Remaja	Jumlah kader PPKBD yang dibina melalui Bintek/Pelatihan, Pertemuan kader PPKBD/Sub PPKBD	287 desa, 2 keg	101.350.000	1 keg	48.194.500	100.00	47,55
5	2.08 . 2.02.01 . 26.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah data Kependudukan (DAK)	Pengadaan sarana rumah data kependudukan	1 paket	19.245.000	1 Paket	0,-	100.00	0,-
6	2.08 . 2.02.01 . 26.10	BOKB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (DAK)	Operasional persiapan program KKBPK berbasis data oleh kader, pelaksanaan KIE oleh kader, Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga melalui POKTAN, Terlaksananya	4 kali, 4 kali, 8 kali, 12 bulan	2.224.910.000	6 bulan	0,-	0.77	0,-

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			pengolahan data						
7	2.08 . 2.02.01 . 26.11	Pengadaan sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK)	pengadaan BKB KIT, pengadaan BKL KIT	53 unit, 34 unit	549.077.000	87 Unit	185.130.000	33.72	75.00,-
8	2.08 . 2.02.01 . 26.12	Pengadaan Alat / Media Pengolah data (DAK)	Pengadaan Sarana Pendataan / Jumlah Pengadaan PC, Jumlah Pengadaan Sarana Pendataan / Printer	7 unit, 7 unit	102.900.000	7 Unit	0,-	93.00	0,-
E	2.08 . 2.02.01 . 27	Program keluarga Berencana	Peserta KB Aktif / CPR	69,81%	3.309.234.000	50%	65.410.000,-	34.36	2.21
1	2.08 . 2.02.01 . 27.01	Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Akseptor KB	Pelayanan safari KB, Pelayanan KB integrasi Tk. Kab, Pelayanan KB Tk Kec, Pembelian side effect Pelayanan KB, Rakor Tim penjamin Mutu Pelayanan, Pelayanan kegagalan alkon, pelayanan kompleks alkon	4 kali, 6 kali, 2 kali, 1250 strip, 2 kali, 3 kasus, 3 kasus, 10 kasus	508.640.000	1 kali, 1 kali	61.315.000	34,87	12,05
2	2.08 . 2.02.01 . 27.02	Kemitraan dan KIE	Pelatihan KIE bagi Tokoh masyarakat, Pelatihan KIE bagi kader PPKBD/Sub PPKBD, Kegiatan rakor pelayanan integrasi, penanganan integrasi KB, Peningkatan kapasitas bagi PKB	1 kali, 1 kali, 6 kali, 1 kali, 1 kali	120.215.000	1 kali, 3 kali, 1 kali	4.095.000	13,83	3,41
3	2.08 . 2.02.01 . 27.03	Pengembangan Kampung KB	Rakor Tim Program KKBP Tk Kab,	1 kali, 18 kali, 1 kali	0,-	-	0,-	0.00	0,-

No	Kode Kegiatan	Program- Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja TW II		Tingkat Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
			Rakor program KKBPK Tk Kec, Rapat konsultasi teknis pengembangan kampung KB Tk Kab.						
4	2.08.2.02.01.27.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Pelayanan KB	Pengadaan Klem U dan Lampu Tindakan	484 unit, 7 unit	50.000.000	484 unit, 7 unit	0,-	25.00	0,-
5	2.08.2.02.01.27.05	BOKB (DAK) Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan pertemuan Pokja Kampung KB, Jumlah kegiatan penyuluhan di Balai Penyuluh, Jumlah Penyuluhan Media KIE (cetak dan elektronik)	3 kali, 8 kali, 1 kali	1.870.872.000	1 kali, 1 kali	0,-	8.84	0,-
6	2.08.2.02.01.27.06	Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rakor Kespro, Talk show GenRe, Pelatihan Konsep Teman Sebaya, Rakor Keg. PIK R, Pemilihan Duta GenRe Tk Kab, Pengembangan materi PIK R, Pendidikan PUP bagi siswa SLTP dan SLTA, Pembentukan PIK R	1 keg, 2 keg, 3 keg, 1 keg, 1 keg, 2 keg, 3 keg, 2 keg	9.507.000	1 keg	0,-	100.00	0,-
7	2.08.2.02.01.27.07	Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	Pengadaan MUPEN KB	1 unit	750.000.000	1 unit	0,-	58.00	0,-

Slawi, 1 Juli 2020
Plt. Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI,SH, MM,M.Kn
NIP. 19601101 198603 2 008

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB dapat diambil beberapa kesimpulan capaian pelaksanaannya antara lain :

- a. Penetapan SOTK baru berimplikasi pada penataan personel/pejabat baru serta kegiatan baru, dimana personel yang baru belum menguasai tugas pokok dan fungsinya sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Rotasi intern/penataan staf serta kurangnya jumlah pegawai juga berimplikasi pada kurang lancarnya kegiatan karena harus melakukan adaptasi di tempat/bidang yang baru.

Oleh karenanya diperlukan diperlukan pembenahan manajemen dan pengawasan melekat serta upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan realisasi kegiatan yang telah direncanakan melalui monitoring dan evaluasi rutin.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berusaha untuk mencapai target yang tertuang di Dokumen RENSTRA dengan tolak ukur Indikator Kinerja Sasaran sebagai mana dijelaskan pada tabel

2.52

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pencapaian Kota Layak Anak	-	√	KLA Nindya	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	0.00	0,00	KLA Pratama	KLA Pratama
2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	-	√	2	2	2	2	1.00	2.00	2.00	2.00
3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	-	-	60	70	80	90	87.00	55	48	60
4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	-	-	100,00	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	-	-	54	54	54	54	30.00	54.00	54.00	54.00
6	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	-	-	40	40	40	47	60.00	45.00	45.00	50.00
7	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	-	-	50	50	50	50	18.00	48.00	48.00	40.00
8	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	50	50	50	50	60.00	50.00	50.00	50.00
9	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	50	50	50	50	30.00	58.00	58.00	40.00
10	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	-	-	100	100	100	100	0,00	0.00	100	100
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan	√	-	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak										
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	√	-	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	√	-	60	65	70	75	55.00	100.00	100.00	75.00
14	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	60.0	65.0	70.0	75.0	55.00	100.00	100.00	75.00
15	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	-	-	25	25	25	25	140.00	150.00	150.00	50.00
16	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	-	-	50	50	50	50	70.00	70.00	70.00	70.00
17	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	-	-	50	50	70	67	7.03	16.00	16.00	67.00
18	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	-	-	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	70.00	82.00	82.00	83.00
19	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	-	-	3 kec	4.00	4 kec	4 kec	8	4	4	18
20	Jumlah Forum anak yang aktif	-	-	4 Forum	4.00	5 Forum	5 Forum	5.00	7.00	7.00	5.00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	-	-	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	0.00	50.00	70.00	80.00
22	IPG	-	√	62,72	63.72	64,72	65,72	86.76	87.52	87.52	86.95
23	IDG	-	√	60,16	65.16	70,16	70,16	51.16	68.90	68.90	69.25
24	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	-	√	48,54	51.54	54,54	57,54	42.54	48.16	18.16	49.81
25	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	-	√	10	10	10	15	20.00	20.00	20.00	24.00
26	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	-	√	32,17	35.17	38,17	41,17	26.17	29.03	29.03	32.00
27	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	√	-	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	√	-	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan	√	-	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu										
30	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	√	-	75	75	75	100	100.00	100.00	100.00	100.00
31	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	80	80	80	80	100.00	100.00	100.00	100.00
32	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
33	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	65	70	75	80	80.00	100.00	100.00	100.00
34	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
35	Peserta KB aktif	-	-	248,613	261,043	274,095	287,800	210,584	206,398	203,349	205.527

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Persentase DO	-	√	14,75	13,21	11,67	10,13	17,57	17,860	15,99	11,00
37	Persentase Unmeet Need	-	√	14,07	13,97	13,87	13,77	13,37	13,97	14,22	15,47
38	Jumlah sosialisasi KRR	-	-	250	300	300	300	300	200	200	300
39	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	-	-	59,00	61,00	63,00	65,00	57	62	64	66
40	Rasio Akseptor KB	-	-	83,88	88,07	92,48	97,10	71,85	70,80	69,58	67,91
41	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	-	-	84,30	85,70	86,30	87,00	80,75	83,03	58,21	79,26
42	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100
43	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	75,00	78,00	78,00	70,00
44	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45	Jumlah Pusat Konseling KRR	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	48,00	1,0	1,0	1
46	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
47	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
48	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	-	-	54,00	62,00	80,00	92,00	70,00	60,00	60,00	112

Slawi, 10 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI, SH, MM, M.Kn
NIP. 19601101 198603 2 008

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2 dan KB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - 1) Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar
 - 2) Pemanfaatan SDM di perangkat daerah belum sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki.
 - 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang masih kurang
 - 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
- b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pelaksanaan PPRG belum terinternalisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
 - 2) Masih rendahnya partisipasi perempuan/jumlah perempuan sebagai pejabat publik, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah
 - 3) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - 4) Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 5) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri tentang PPPA masih belum optimal
 - 6) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 7) Pelayanan terhadap korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang belum maksimal
- c. Permasalahan Bidang Perlindungan Anak
 - 1) Sulitnya mendeteksi kasus penelantaran pada anak
 - 2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- d. Permasalahan terkait Bidang Keluarga Berencana
 - 1) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga
 - 2) Rendahnya pengetahuan PUS tentang metode dan alat kontrasepsi.
 - 3) Kesertaan KB Pria dan peranan pria dalam ber KB masih rendah

- 4) Angka unmet need masih tinggi, drop out peserta KB yang tinggi, kesertaan KB pria masih rendah dan penggunaan MKJP terus menurun menjadi tantangan yang serius bagi pelayanan KB ke depan
- e. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
- 1) Belum adanya grand design kependudukan
 - 2) Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk
 - 3) Menurunnya fungsi pengawasan dan perlindungan dalam keluarga
 - 4) Semakin renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat dari akibat perkembangan teknologi informasi
 - 5) Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini, dan kehamilan tidak diinginkan
 - 6) Kegiatan kelompok bina keluarga sejahtera yang belum berjalan dengan baik
 - 7) Kelompok pemberdayaan masyarakat (UPPKS) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya selain membutuhkan modal juga perlu pengetahuan dan ketrampilan usaha yang sesuai dengan potensi lokal.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:

1. Belum tercapainya ratio antara desa binaan dengan PLKB dimana idealnya 1 PLKB/PKB menangani rata-rata 2 desa saja, sedangkan kondisi saat ini 1 PLKB/PKB menangani 3 sampai 4 Desa
2. Meningkatkan Penyuluhan Usia Pernikahan melalui kegiatan KIE sehingga Usia Kawin pertama wanita dapat lebih dari 21 tahun.
3. Masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang belum sesuai target yang ditetapkan
4. Meningkatkan capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB agar sesuai dengan yang di targetkan.
5. Meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ikut program BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK/R
6. Meningkatkan keaktifan keluarga untuk mengikuti pertemuan kelompok BKB, BKR, BKL.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas P3AP2 dan KB:

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program KKBPK menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2025.
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan KKBPK di Kabupaten Tegal.
4. Berkembang luasnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam kehidupan masyarakat sehingga informasi-informasi tentang program Keluarga Berencana dapat lebih mudah diakses.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2020 yang masuk pada tahapan tahun ke 2 (dua) dari dokumen RPJMD. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang baik pada aspek ekonomi, aspek sosial dan berbagai hal lainnya dalam suasana kehidupan keagamaan dan sosial yang kondusif. Selain itu juga adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangkapenerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Secara sosial dan ekonomi diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat (SDM) yang merupakan tujuan mendasar dan dilakukan secara bertahap terhadap aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting yang ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas P3AP2 dan KB, hal ini ditunjukkan melalui : Pernyataan misi ke IV yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang

pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan misi ke-4 tersebut, Dinas P3AP2 dan KB berperan dalam menciptakan keluarga yang ideal dan harmonis sehingga berimbas kepada kesanggupan untuk memberikan hak-hak pendidikan, kesehatan, kecukupan sandang pangan yang pada akhirnya bisa menuju kepada keluarga yang sejahtera, sesuai dengan tugas pokok Dinas P3AP2 dan KB.

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap PD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 yang ditetapkan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas P3AP2 dan KB Tahun 2021 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Anak;
3. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
4. Program Keluarga Berencana;
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB

Namun dalam perjalanannya, mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas P3AP2 dan KB telah melaksanakan mapping/pemetaan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut sehingga program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Pemenuhan Hak Anak;
3. Program Perlindungan Khusus Anak;
4. Program Pengendalian Penduduk;
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Tegal

Nama PD :Dinas P3AP2 dan KB

Lembar 1 dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
A	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB	Kabupaten Tegal	Prosentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	1.046.415	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tegal	Prosentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		
	Subbag. Umum dan Kepegawaian		Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100%		Subbag. Umum dan Kepegawaian		Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100%		
1	Penyediaan jasa kantor	DP3AP2& KB	Perangko dan materai, jasa komunikasi, air, listrik, bahan bacaan, ATK, Keamanan, kebersihan, administrasi keuangan	320 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 51 item, 12 bln, 1095 eks	369.781	Administrasi Umum				638.197	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat						DP3AP2& KB	Materai dan Pengiriman Surat	160 buah, 12 bulan	2.970.		
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jasa komunikasi, air, listrik	12 bulan, 12 bulan, 12 bulan	142.760		
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							Administrasi Keuangan	12 bulan	30.341		
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	50.640		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						e. Penyediaan Alat Tulis Kantor		ATK	46 item	44.602	
						f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan	5 jenis, 5000 lbr	6.260	
						g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Peralatan Listrik	6 item	5.302.4	
						h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga	28 item	9.126.1	
						i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat Kabar	1095 eksemplar	6.473.	
						j. Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan minum harian, makan dan minum rapat	12 bulan	33.200	
2	Rapat koordinasi dan konsultasi	DP3AP2& KB	Makan dan minum, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	1 tahun	136.557	k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	43.585	
3	Pengadaan sarana prasarana kantor	DP3AP2& KB	Mebeleur, almari buku	1 bh, 4 bh, 17 bh	53.590	l. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		CCTV, Kursi Eselon IV, Kursi Lipat, Jet Pump	1 bh, 4 bh, 10 bh, 1 bh	37.600	
4	Pemeliharaan sarana prasarana kantor	DP3AP2& KB	Pemeliharaan gedung kantor, Kendaraan dinas (mobil, motor), AC, Printer, Komputer, PC, LCD	1 thn, 11 mobil, 13 motor, 8 bh, 24 bh, 33 bh, 2 bh	327.237	m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	39.476.5	
						n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan dinas (mobil, motor)	10 mobil, 13 motor,	151.279	
						o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan AC, Printer, Komputer/PC, LCD, Screen	20 bh, 20 bh, 23 bh, 2 bh	34.582	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DP3AP2& KB	Penilaian Angka Kredit, Pendidikan dan Pelatihan	2 periode, 1 tahun	47.250	2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
						Pendidikan dan Pelatihan	DP3AP2& KB	Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	16.310	
	Subbag. Perencanaan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan	100%		Subbag. Perencanaan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan	100%		
6	Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	DP3AP2& KB	Rencana Kerja/Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Review Renstra	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok	50.000	3. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AP2 &KB			30.375	
						a.Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Renstra dan Renja	1 dok, 1 dok	15.000	
						b.Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		RKA, SPIP, LKjIP	1 dok, 1 dok, 1 dok	15.375	
	Subbag. Keuangan		Persentase pemenuhan layanan Keuangan	100%		Subbag. Keuangan		Persentase pemenuhan layanan Keuangan	100%	48.320	
7	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	DP3AP2& KB	Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	62.000	4. Administrasi Keuangan	DP3AP2 &KB			48.320	
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	48.320	
B	Program Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Tegal	Persentase pencapaian Keadilan dan	73%	641.245	Program Pengarusutamaan Gender dan	Kabupaten Tegal	Persentase pencapaian Keadilan dan	73%	256.180	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Kesetaraan Gender (APE)			Pemberdayaan Perempuan		Kesetaraan Gender (APE)			
	Seksi Pengarusutamaan Gender		Persentase pelayanan Pengarusutamaan gender memenuhi standar	40%		Seksi Pengarusutamaan Gender		Persentase pelayanan Pengarusutamaan gender memenuhi standar	40%		
			Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	40%				Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	40%		
1	Pengarusutamaan Gender dan Pembinaan Organisasi Perempuan	DP3AP2& KB	Bimbingan teknis Program dan kebijakan responsif Gender bagi TP PKK desa/kelurahan, Bintek PPRG bagi perencana OPD, Monev PPRG, Pelatihan data pilah Gender, Masyarakat yg memahami KKG, Peringatan Hari Kartini, HUT dan Halal Bi Halal DWP, Peringatan Hari Ibu	120 orang, 60 orang, 10 orang, 30 orang, 100 orang, 1 kali, 1 kali, 1 kali	333.045	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2& KB				
						Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG		Bintek pendidikan politik bagi perempuan, Bintek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender,	1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali	134.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Sosialisasi pemahaman Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi masyarakat, Peringatan Hari Kartini/Hari Ibu, HUT DWP, dan Halal Bil Halal Dharma Wanita Persatuan			
	Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan	100%		Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan	100%		
			Persentase KDRT	15%				Persentase KDRT	15%		
			Persentase perempuan yang mendapat dampingan menjadi pelaku ekonomi	100%				Persentase perempuan yang mendapat dampingan menjadi pelaku ekonomi	100%		
2	Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	DP3AP2& KB	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Rumah sakit	50 orang, 100 orang, 1 kali	308.200	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2& KB				
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat		Perempuan dan anak korban	12 kali, 5 kali, 1	121.820	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
			serta mendapatkan penanganan penganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Pelatihan keterampilan bagi perempuan sosialisasi GSIB			bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		kekerasan yang mendapatkan layanan medis kesehatan/penanganan kasus, Monitoring dan evaluasi penanganan kasus, Fasilitasi pencegahan kekerasan bagi PD, dunia usaha dan stakeholder, Need Assesmen perempuan rentan/disabilitas, Bintek SLRT, Pelatihan usaha ekonomi produktif, pendampingan GSIB, Rakor PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali		
C	Program Perlindungan Anak		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60%	664.995	Program Pemenuhan Hak Anak		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	60%	127.850	
			Program Perlindungan Khusus Anak						131.457		
	Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak		Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk	18%		Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk	18%			
			Persentase Forum Anak Tingkat Desa	12%				Persentase Forum Anak Tingkat Desa	12%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			yang dibentuk					yang dibentuk			
1	Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	DP3AP2& KB	Peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA Tk. Kabupaten, peningkatan jejaring KLA, Pembinaan KELANA, Pembentukan DELANA, peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten, pembentukan Forum Anak Tingkat Desa	4 kali, 4 Kec., 10 desa, 6 keg, 4 Kec, 10 desa	324.995	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2& KB			127.850	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA Tk. Kabupaten, peningkatan jejaring KLA, Pembinaan KELANA, Pembentukan DELANA, peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten, pembentukan Forum Anak Tingkat Desa					
	Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	15%		Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	15%		
2	Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	DP3AP2& KB	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	130 orang	340.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2& KB	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	130 orang	131.457	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap		Pencegahan Kekerasan pada anak, Penerapan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		disiplin positif di sekolah, Penguatan jejaring AMPK, Monev Sekolah Ramah Anak, Pembinaan Taman Penitipan Anak, Data Pilah anak, Pelatihan Konvensi Hak Anak, Pembentukan PATBM	sekolah, 12 TPA, 1 dokumen, 130 org, 3 Kecamatan		
D	Program Keluarga Berencana		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70.21 %	7.629.026	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70.21 %	7.410.225	
	Seksi Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan		Persentase Unmeet Need	13.90 %	5.975.658	Seksi Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan		Persentase Unmeet Need	13.90 %	5.785.662	
1	Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan	DP3AP2& KB	Pemutaran film Program KKBPK, Partisipasi dalam kegiatan pameran pembangunan, Pelatihan KIE bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD, Peningkatan kapasitas bagi PKB/PLKB, Rapat Koordinasi	6 kali, 1 kali, 137 kader, 1 kali, 6 kali, 1 kali, 1 kali	280.514	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	DP3AP2& KB	Pameran pembangunan Hari Jadi Kab. Tegal, Pemutaran Film Program KKBPK, Rakor Pelayanan Integrasi, Pencanaan Integrasi gerak PKK KB Kesehatan,	1 kali, 6 kali, 6 kali, 1 kali, 1 kali, 100 kader, 1 kali	90.518	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
			pelayanan integrasi KB, Pencanaan Gerak PKK-KB-Kesehatan, Rapat Tim Koordinasi Program KKBPK Pengembangan Kampung KB					Rapat Tim koordinasi Pengembangan kampung KB Tingkat Kab. Tegal, Rapat Konsultasi Tehnis Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten, Pelatihan KIE bagi Kader PPKBD / Sub PPKBD, Peningkatan kapasitas bagi PKB /PLKB			
2	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK	DP3AP2& KB	Biaya operasional di Balai Penyuluhan	12 bulan	5.695.144	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Biaya operasional di Balai Penyuluhan	12 bulan	5.695.144	
								Biaya operasional pengolahan data, operasional PPKBD dan Sub PPKBD, Pertemuan kelompok kegiatan Tribina	12 bulan		
								Pelaksanaan rapat pokja, musyawarah desa, dan mini lokakarya di Kampung KB, Orientasi kader di kampung KB percontohan, Pengadaan media cetak KIE	6 kali, 3 kali, 3 kali, 1 kali, 1 kali, 1 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB Baru terlayani	94.20 %	462.308	Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB Baru terlayani	94.20 %			
			Persentase Tenaga medis yang kompeten dalam pelayanan KB MKJP	68.22 %				Persentase Tenaga medis yang kompeten dalam pelayanan KB MKJP	68.22 %			
			Persentase Drop Out Kepesertaan KB	15.30 %				Persentase Drop Out Kepesertaan KB	15.30 %			
3	Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	DP3AP2& KB	Pelayanan Safari KB, Pelayanan KB Integrasi Tingkat Kabupaten, Pelayanan Tk Kecamatan 18 Kec, Pembelian Side Efek Pelayanan KB, Pelayanan Kegagalan Kontrasepsi, Pelayanan Komplikasi Kontrasepsi	4 kali, 6 kali, 2 kali, 2 kali, 600 strip,3 kasus, 10 kasus	462.308	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2& KB			1.581.281		
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				Pelayanan Safari KB, Pelayanan KB Integrasi Tingkat Kabupaten, Pelayanan Tk Kecamatan 18 Kec, Pembelian Side Efek Pelayanan KB, Pelayanan Kegagalan Kontrasepsi,	4 kali, 7 kali, 2 kali, 1250 strip,3 kasus, 10 kasus	300.500			
4	Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan KB	DP3AP2& KB	Pengadaan tensimeter stand type	27 unit	47.500	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kb	DP3AP2& KB	Pengadaan tensimeter stand type	24 unit	40.217		
								Pengadaan Implant Removal	65 unit	252.917		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Pengadaan Sepeda Motor Oprs PLKB (DAK)	40 unit	1.000.000			Kit Pengadaan Sepeda Motor Oprs PLKB (DAK)	45 unit	987.647	
	Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja		Proporsi usia nikah muda < 20 tahun	14.50 %		Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja		Proporsi usia nikah muda < 20 tahun	14.50 %		
5	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	DP3AP2& KB	Rapat Koordinasi, Talkshow GenRe, Pelatihan Konseling Sebaya, Sosialisasi Saka Kencana, Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kab, Pengembangan materi PIK-R, Pendidikan PUP bagi siswa SLTP/SLTA, Pembentukan Saka Kencana	2 kali, 50 org, 50 org, 50 org, 2 materi, 200 org, 50 org	143.560	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DP3AP2& KB	Rapat koordinasi pengelola Program KKBPB bagi PLKB, Pemilihan Duta GenRe, Sosialisasi/Technical meeting Duta GenRe, Rapat Pembinaan Duta GenRe tk propinsi, Rapat Sosialisasi Saka Kencana percontohan, Talkshow GenRe, Sosialisasi PUP dan Pembinaan PIK R	1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali	43.282	
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera		Angka Kelahiran Total / TFR	2.40	894.097	Program Pengendalian Penduduk tera		Angka Kelahiran Total / TFR	2.40	367.400	
			Persentase Ketahanan Keluarga	52%		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Persentase Ketahanan Keluarga	52%	353.000	
	Seksi Data dan Informasi		Pemutahiran data Keluarga	287		Seksi Data dan Informasi		Pemutahiran data Keluarga	287	166.525	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
				desa					desa		
1	Data dan Informasi	DP3AP2& KB	Pengumpulan data, dokumen hasil analisis Data	12 bulan, 12 dok	221.891	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DP3AP2& KB			166.500	
						Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Pengumpulan data, dokumen hasil analisis Data	12 bulan, 12 dok		
2	Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan Pendataan	DP3AP2& KB	Persentase Pembuatan Rumah Data di Kampung KB	1 kampung KB	25.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain	DP3AP2& KB	Persentase Pembuatan Rumah Data di Kampung KB	1 kampung KB	25.000	
	Seksi Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk		Persentase Pembentukan SSK/ Sekolah Siaga Kependudukan	2 % (5 seko lah)		Seksi Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk		Persentase Pembentukan SSK/ Sekolah Siaga Kependudukan	2 % (5 seko lah)		
3	Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk	DP3AP2& KB	Persentase terbinanya Institusi Masyarakat	80%	282.206	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP3AP2& KB	Persentase terbinanya Institusi Masyarakat	80%		
			Pembentukan SSK, Kemitraan dengan Sektor terkait dlm pengendalian penduduk dibanding jumlah seluruh sektor yang terkait dalam	2 Sklh, 4 kali, 3 kali, 287 orang, 2 keg		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Rapat Kemitraan dengan Sektor Terkait, Rapat Koalisi Kependudukan, Rapat Koordinasi FAPSEDU, Sosialisasi Pembangunan Berwawasan	3 OPD/Le mbaga, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali	175.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			pengendalian penduduk, Rapat Koordinasi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan, Jumlah bimbingan teknis kader PPKBD/Sub PPKBD, Pertemuan kader PPKBD/Sub PPKBD					Kependudukan , Rapat Grand Design Kependudukan			
	Seksi Keluarga Sejahtera		Persentase terbinanya Ketahanan Keluarga melalui Poktan	49%		Seksi Keluarga Sejahtera		Persentase terbinanya Ketahanan Keluarga melalui Poktan	49%		
4	Keluarga Sejahtera	DP3AP2&KB	Jumlah tenaga pendamping bina keluarga yang dilatih, Jumlah kader BKR dan BKL Percontohan yang dilatih, Jumlah Kader BKB yang dilatih tumbuh kembang anak, Jumlah kader UPPKS yang dilatih, Jumlah kader Pokja II	54 orang, 54 orang, 54 orang, 54 orang, 1 unit, 54 orang	190.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2&KB			178.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			dan IV PKK yang dilatih BKB Posyandu PADU								
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah tenaga pendamping bina keluarga yang dilatih, Jumlah kader BKR dan BKL Percontohan yang dilatih, Jumlah Kader BKB yang dilatih tumbuh kembang anak, Jumlah kader UPPKS yang dilatih, Jumlah kader Pokja II dan IV PKK yang dilatih BKB Posyandu PADU	54 orang, 54 orang, 54 orang, 54 orang, 1 unit, 54 orang		
5	Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan kelompok kegiatan tribina	DP3AP2& KB	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	36%	175.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	DP3AP2& KB	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	36%	175.000	
	JUMLAH TOTAL PAGU				10.875.778	JUMLAH TOTAL PAGU				9.204.314	

Penjelasan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2021 dijelaskan pada halaman selanjutnya.

Hasil Dari Rincian Tabel 2.3, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2021 terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara rancangan awal RKPD tahun 2021 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2021 dimana hasil analisis kebutuhan tahun 2021 anggarannya cenderung menurun dari anggaran Rancangan Awal RKPD tahun 2021 hal itu disebabkan karena terjadinya defisit APBD Kabupaten Tegal serta pemulihan ekonomi terkait pandemi *covid-19*. Pagu indikatif PD yang mengacu pada dokumen RPJMD dimana Pagu Indikatif untuk Dinas P3AP2 dan KB untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 10.875.778.000,-. Untuk Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2021 Pagu indikatif perlu dirasionalisasikan berdasarkan kebutuhan yaitu Rp. 9.204.314.000,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka pelaksana Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Pembangunan tahunan lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Setiap Proses Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota. Musrenbang 2020 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi Kepala Daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan Kegiatan Musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan Bottom up dengan perencanaan bersifat Top Down

sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan masing – masing tahapan musrenbang di Kabupaten Tegal dapat berjalan dengan baik, maka disusun pedoman yang lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Forum PD. Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat Musrenbang Kabupaten Tegal adalah suatu keterpaduan dan kesinambungan dari proses musyawarah perencanaan pembangunan. Masing – masing tahapan musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegritasi dalam satu kesatuan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Rencana Kerja (RENJA) Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pada forum PD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas P3AP2 dan KB selaku PD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan PD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Pada saat dilaksanakan Musrenbang Komunitas (anak dan perempuan) pada minggu ke-2 bulan Maret 2020 terdapat beberapa usulan yaitu :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Komunitas Perempuan dan Anak Tahun
2021
Kabupaten Tegal

Nama PD :Dinas P3AP2 dan KB

Lembar 1 dari

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Besaran/ Volume	Komunitas
1.	Sosialisasi Konvensi Hak Anak	Kabupaten Tegal	Anak Kabupaten Tegal	1 kali	Anak
2.	Jambore Anak	Kabupaten Tegal	Anak Kabupaten Tegal	1 kali	Anak
3.	Rehabilitasi Gedung Fasilitasi Forum Anak Kab. Tegal	Kelurahan Pakembaran	Anak Kabupaten Tegal	1 paket	Anak
4.	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kabupaten Tegal	PD, Ormas, 18 Kecamatan, 287 desa/Kelurahan	1 kali	Perempuan
5.	Pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan stunting, AKI, AKB, Pendidikan Politik Perempuan	Kabupaten Tegal	Ormas dan TP-PKK	1 kali	Perempuan
6.	Pemberlakuan Jam Belajar (18.00 – 21.00)	Kabupaten Tegal	Masyarakat dan Keluarga	-	Anak

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu makna dari Rencana Pembangunan Daerah dimaksud adalah berkeadilan yang artinya pembangunan harus menerapkan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Guna mewujudkan hal ini Kementerian PPPA telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Indeks pembangunan gender (IPG)
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)
	TPAK Perempuan
	Indeks PUG Nasional
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Proporsi Perempuan Usia 20 -24 menikah < usia 18 tahun

Tujuan	Sasaran
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA
	Persentase Balita yang mendapatkan pengasuhan layak
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Partisipasi Masyarakat
	Indeks Kualitas Keluarga
Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif
	Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
	Persentase anak berusia 10 – 17 tahun yang bekerja
	Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan sesuai standar

Hal ini senada dengan sasaran strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas P3AP2 dan KB, yaitu meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender serta Perlindungan Anak, dengan indikator IPG, IDG dan Pemenuhan Hak Anak melalui Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak. Sasaran strategis ini kemudian dirinci dalam indikator kinerja program/kegiatan :

1. Program Pemberdayaan Perempuan
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Program Perlindungan Anak
 - Prosentase pencapaian pemenuhan Hak Anak

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan Program KKBPK merupakan salah satu fokus Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Guna mewujudkan hal ini BKKBN telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

Tujuan dan Sasaran Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Target	
		Awal (2020)	Akhir (2024)
1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.26	2.21
	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61.78	63.41
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed	8.6	7.4
	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	25 per 1000 kelahiran hidup	18 per 1000 kelahiran hidup
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53.57	61.00
	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21.9	22.1

Ini senada dengan sasaran strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas P3AP2 dan KB, yaitu

meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerjanya yaitu LPP dan TFR. Sasaran strategis ini kemudian dirinci dalam indikator kinerja program/kegiatan :

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
 - Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk
 - Angka Kelahiran Total /TFR
 - Prosentase Ketahanan keluarga
2. Program Keluarga Berencana
 - Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR)

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
- 2) Meningkatkan pemenuhan hak anak
- 3) Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
- 4) Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender
- 2) Meningkatnya pemenuhan hak anak
- 3) Menurunnya Angka Kelahiran Total/TFR
- 4) Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga
- 6) Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal memuat program kegiatan untuk pencapaian Visi Misi Bupati Tegal berdasarkan pada tugas pokok. Untuk itu telah disusun program dan kegiatan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang mencakup :

a. Program

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan
- 2) Program Pemberdayaan Perempuan
- 3) Program Perlindungan Anak
- 4) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
- 5) Program Keluarga Berencana

Adapun program yang dilaksanakan berdasar hasil pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2). Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 3). Program Pemenuhan Hak Anak
- 4). Program Perlindungan Khusus Anak
- 5). Program Pengendalian Penduduk
- 6). Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 7). Program Pembinaan dan Peningkatan keluarga sejahtera (KS)

b. Kegiatan

Keseluruhan program kerja yang di emban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,

khususnya keluarga pra sejahtera. Program utama tersebut terinci pada beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan, yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Kantor
 - b) Pemeliharaan Sarana prasarana Kantor
 - c) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
 - d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e) Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
 - f) Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - g) Rapat Konsultasi dan Koordinasi
- 2) Program Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 - a) Pengarusutamaan gender
 - b) Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- 3) Program Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a) Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak
 - b) Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 4) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas :
 - a) Data dan Informasi
 - b) Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan Pendataan
 - c) Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk
 - d) Keluarga Sejahtera
 - e) Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan kelompok kegiatan tribina
- 5) Program Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a) Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
 - b) Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan
 - c) Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan KB
 - d) Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja
 - e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berdasar hasil pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , yang terdiri dari :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2). Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, yang terdiri atas :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3). Program Pemenuhan Hak Anak dengan kegiatannya yaitu : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4). Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatannya yaitu : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 5). Program Pengendalian Penduduk yang kegiatannya terdiri atas :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- 6). Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang kegiatannya terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- 7). Program Pembinaan dan Peningkatan keluarga sejahtera (KS) dengan kegiatannya yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV

RENCANA KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN TEGAL**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
NON URUSAN											
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Dinas P3AP2 dan KB	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	DP3A P2&KB	100%	981.637.000			PAD		100%	707.502.000	
Subbag. Umum dan Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian		100%						100%		
Penyediaan jasa kantor	Perangko dan materai, jasa komunikasi, air, listrik, bahan bacaan, ATK, Keamanan, kebersihan, administrasi keuangan		320 buah, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 51 item, 12 bulan, 1095 eks	353.222.000						262.530.000	Usulan OPD

Pemeliharaan sarana prasarana kantor	Pemeliharaan gedung kantor, Kendaraan dinas (mobil, motor), AC, Printer, Komputer, PC, LCD		1 tahun, 11 mobil, 13 motor, 8 bh, 24 bh, 33 bh, 2 bh	251.228.000					205.000.000	Usulan OPD
Pengadaan sarana prasarana kantor	Rehabilitasi Ruang Sekretariat Forum Anak Almari buku, Kursi Eselon IV, Meja Rapat, Kursi Lipat		1 Gedung 1 bh, 6 bh, 1 bh, 25 bh	75.000.000 55.943.000					75.000.000 37.600.000	Musrenbang Usulan OPD
Rapat koordinasi dan konsultasi	Makan dan minum, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah		1 tahun	129.557.000					101.327.000	Usulan OPD
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penilaian Angka Kredit, Pendidikan dan Pelatihan		2 periode, 1 tahun	20.465.000					17.650.000	Usulan OPD
Subbag. Perencanaan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan		100%					100%		
Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Rencana Kerja/Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Review Renstra		1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok	40.555.000					35.075.000	Usulan OPD
Subbag. Keuangan	Persentase pemenuhan layanan Keuangan		100%					100%		
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	Laporan Administrasi Keuangan		12 bulan	55.667.000					48.320.000	Usulan OPD
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender (APE)	DP3A P2&KB	73%	541.366.000			PA D	75%	273.380.000	

Seksi Pengarusutamaan Gender	Persentase pelayanan Pengarusutamaan gender memenuhi standar		40%					45%		
	Persentase Organisasi Perempuan yang aktif		40%					50%		
Pengarusutamaan Gender	Bintek pendidikan politik bagi perempuan, Bintek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Sosialisasi pemahaman Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi masyarakat, Peringatan Hari Kartini/Hari Ibu, HUT DWP, dan Halal Bil Halal Dharma Wanita Persatuan		1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, 1 kali	283.10 6.000					142.96 0.000	Usulan OPD
Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan		100%					100%		
	Persentase KDRT		15%					15%		
	Persentase perempuan yang mendapat dampingan menjadi pelaku ekonomi		100%					100%		

Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan medis kesehatan/penanganan kasus, Monitoring dan evaluasi penanganan kasus, Fasilitasi pencegahan kekerasan bagi PD, dunia usaha dan stakeholder, Need Assesmen perempuan rentan/disabilitas, Bintek SLRT, Pelatihan usaha ekonomi produktif, pendampingan GSIB, Rakor PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		12 kali, 5 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali	258.26 0.000					130.42 0.000	Usulan OPD
Program Perlindungan Anak	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	DP3A P2&KB	60%	548.13 3.000			PA D	65%	276.80 7.000	
Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk		18%					21%		
	Persentase Forum Anak Tingkat Desa yang dibentuk		12%					19%		
Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA Tk.Kabupaten, Peningkatan jejaring KLA, Pembinaan KELANA, Pembentukan DELANA, Peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten, Jambore Anak		4 keg, 4 Keg, 4 keg, 30 desa, 5 Kali, 1 kali	270.00 0.000					136.35 0.000	Usulan OPD

Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani		15%					20%		
Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)		130 orang					140 orang		
	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk di Kecamatan Layak Anak		44%					61%		
	Pencegahan Kekerasan pada anak, Penerapan disiplin positif di sekolah, Penguatan jejaring AMPK, Monev Sekolah Ramah Anak, Pembinaan Taman Penitipan Anak, Data Pilah anak, Pelatihan Konvensi Hak Anak, Pembentukan PATBM		1 keg, 4 Kec, 1 Keg, 10 sekolah, 12 TPA, 1 dokumen, 130 org, 3 Kecamatan	278.133.000					140.457.000	Usulan OPD
						7.765.910.900				
Program Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	DP3A P2&KB	70,21 %	830.202.900		6.935.708.000		70,61 %	503.717.000	
Seksi Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan	Persentase Unmeet Need		13,90 %					13,70 %		

Jaminan Advokasi, KIE, dan Pembinaan Lini Lapangan	Pameran pembangunan Hari Jadi Kab. Tegal, Pemutaran Film Program KKBPk, Rakor Pelayanan Integrasi, Pencanaan Integrasi gerak PKK KB Kesehatan, Rapat Tim koordinasi Pengembangan kampung KB Tingkat Kab. Tegal, Rapat Konsultasi Tehnis Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten, Pelatihan KIE bagi Kader PPKBD / Sub PPKBD, Peningkatan kapasitas bagi PKB /PLKB		1 kali, 6 kali, 6 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 100 kader, 1 kali	220.20 2.900			PA D		110.00 0.000	Usulan OPD
Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru terlayani		94,20 %						94,40 %	
	Persentase Tenaga medis yang kompeten dalam pelayanan KB MKJP		68,22 %						70,17 %	
	Persentase Drop Out Kepesertaan KB		15,30 %						15,00 %	
Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	Pelayanan Safari KB, Pelayanan KB Integrasi Tingkat Kabupaten, Pelayanan Tk Kecamatan 18 Kec, Pembelian Side Efek Pelayanan KB, Pelayanan		4 kali, 7 kali, 2 kali, 1250 strip, 3 kasus, 10 kasus	455.00 0.000			PA D		300.50 0.000	Usulan OPD

	Kegagalan Kontrasepsi, Pelayanan Komplikasi Kontrasepsi									
Pengadaaaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan KB	Pengadaan tensimeter		24 unit	40.000.000				100 %	40.217.000	Usulan OPD
	Pengadaan Implant Removal Kit		65 unit			252.917.000	DAK			
	Pengadaan Sepeda Motor Oprs PLKB (DAK)		45 unit			987.647.000	DAK			
Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Proporsi usia nikah muda < 20 tahun		14,50 %					14,25 %		
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Rapat koordinasi pengelola Program KKBPK bagi PLKB, Pemilihan Duta GenRe, Sosialisasi/Technical meeting Duta GenRe, Rapat Pembinaan Duta GenRe tk propinsi, Rapat Sosialisasi Saka Kencana percontohan, Talkshow GenRe, Sosialisasi PUP dan Pembinaan PIK R		1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali	115.000.000			PA D		53.000.000	Usulan OPD
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Biaya operasional di Balai Penyuluhan		12 bulan			5.695.144.000	DAK			Usulan OPD

	Biaya operasional pengolahan data, operasional PPKBD dan Sub PPKBD, Pertemuan kelompok kegiatan Tribina		12 bulan							
	Pelaksanaan rapat pokja, musyawarah desa, dan mini lokakarya di Kampung KB, Orientasi kader di kampung KB percontohan, Pengadaan media cetak KIE		6 kali, 3 kali, 3 kali, 1 kali, 1 kali, 1 paket							
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Angka Kelahiran Total / TFR	DP3A P2&KB	2,40	557.20 0.000	200.00 0.000			2,37	557.20 0.000	
	Persentase Ketahanan Keluarga		52%					55%		
Seksi Data dan Informasi	Pemutahiran data Keluarga		287 desa					287 desa		
Data dan Informasi	Pengumpulan data, dokumen hasil analisis Data		12 bulan, 12 dok	177.50 0.000		PA D			177.50 0.000	Usulan OPD
Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan Pendataan	Persentase Pembuatan Rumah Data di Kampung KB		1 kampung KB		25.000.000	DA K				Usulan OPD
Seksi Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Persentase Pembentukan SSK/ Sekolah Siaga Kependudukan		2 % (5 sekolah)					3 % (7 sekolah)		
Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian	Persentase terbinanya Institusi Masyarakat		80%					85%		

Penduduk											
	Rapat Kemitraan dengan Sektor Terkait, Rapat Koalisi Kependudukan, Rapat Koordinasi FAPSEDU, Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Rapat Grand Design Kependudukan		3 OPD/L embaga, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali	189.700.000					189.700.000		Usulan OPD
Seksi Keluarga Sejahtera	Persentase terbinanya Ketahanan Keluarga melalui Poktan		49%					51%			
Keluarga Sejahtera	Jumlah tenaga pendamping bina keluarga yang dilatih, Jumlah kader BKR dan BKL Percontohan yang dilatih, Jumlah Kader BKB yang dilatih tumbuh kembang anak, Jumlah kader UPPKS yang dilatih, Jumlah kader Pokja II dan IV PKK yang dilatih BKB Posyandu PADU		54 orang, 54 orang, 54 orang, 54 orang, 1 unit, 54 orang	190.000.000			PA D		190.000.000		Usulan OPD
Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan kelompok kegiatan tribina	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)		36%		175.000.000		DA K	36%			Usulan OPD
PAGU INDIKATIF				3.458.538.900	7.135.708.000				2.318.606.000		

TOTAL PAGU INDIKATIF			10.594. 246.90 0		-				-	
----------------------	--	--	------------------------	--	---	--	--	--	---	--

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL**

KODE	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	K E T
	U	P	K	SK				
X X 0 X 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pemenuhan layanan kesejahteraan	100%	782.502.000	
X X 0 X 1 0 1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
X X 0 X 1 2 0 1				Penyusunan Program dan Kegiatan	Rencana Kerja/Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Review Renstra	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok,	35.075.000	

									Per an gka t Da era h dal am Do ku me n Per enc an aa n		1 do k		
X	X X	0 1	2 .0 2					Administrasi Keuangan					
X	X X	0 1	2 .0 2	0 6				Pe nyu sun an La por an Ca pai an Kin erj a da n Ikht isar Re alis asi Kin erj a SK PD	Lapor an Admi nistra si Keua ngan	12 bul an	48. 320 .00 0		
X	X X	0 1	2 .					Administrasi Umum					

			0 3										
X	X X	0 1	2 0 3	0 2					Pe nye dia an Jas a Ko mu nik asi, Su mb er Da ya Air da n List rik	Peran gko dan mater ai, jasa komu nikasi , air, listrik, baha n baca an, ATK, Keam anan, keber sihan, admi nistra si keua ngan	32 0 bu ah, 12 bul an, 12 bul an, 12 bul an, 51 ite m, 12 bul an, 10 95 eks	262 .53 0.0 00	
X	X X	0 1	2 0 3	1 8					Ra pat - Ra pat Kor din asi da n Ko nsu ltas i ke Lu ar Da era h	Maka n dan minu m, Perjal anan Dinas dala m dan luar daera h	1 tah un	101 .32 7.0 00	
X	X X	0 1	2 0 3	2 4					Pe ng ad aa	Almar i buku, Kursi	1 bh, 6 bh,	37. 600 .00	

									n Per alat an Ge du ng Ka nto r	Eselo n IV, Meja Rapat , Kursi Lipat	1 bh, 25 bh	0	
X	X X	0 1	2 .0 3	3 4					Pe mel iha raa n Rut in/ Ber kal a Per alat an Ge du ng Ka nto r	Peme liha ran gedu ng kanto r, Kend araan dinas (mobi l, motor) , AC, Printe r, Komp uter, PC, LCD	1 tah un, 11 mo bil, 13 mo tor , 8 bh, 24 bh, 33 bh, 2 bh	205 .00 0.0 00	
										Reha bilitas i Ruan g Sekre tariat Foru m Anak	1 Ge du ng	75. 000 .00 0	
X	X X	0 1	2 .0 4					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
X	X X	0 1	2 .0 4	0 9					Pe ndi dik an da	Penil aian Angk a Kredit	2 pe rio de, 1	17. 650 .00 0	

									n Pel atih an For mal	, Pendi dikan dan Pelati han	ta hun		
2	0												
	8												
2	0	0											
	8	2										273	
												.38	
												0.0	
												00	
2	0	0	2										
	8	2	.										
			0										
			1										
									Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	0	0	2	0									
	8	2	.	4									
			0										
			1										
									Sosial isa si keb ijak an Pel aks an aa n PU G ter ms suk PP RG	Binte k pendi dikan politik bagi pere mpua n, Binte k Peren cana an Peng angg aran Resp onsif Gend er,	1 kal i, 2 kal i, 3 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 1 kal i	142	
												.96	
												0.0	
												00	

								Sosialisasi pemahaman Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi masyarakat, Peringatan Hari Kartini/Hari Ibu, HUT DWP, dan Halal Bil Halal Dharma Wanita Persatuan				
2	0	0	2				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
8		3	.02									

2	0	0	2	0				Pe nye dia an Lay an an Pe ng ad ua n Ma sya rak at ba gi Per em pu an Kor ba n Ke ker asa n Ke we na ng an Ka bu pat en/ Kot a	Pere mpua n dan anak korba n keker asan yang mend apatk an layan an medis keseh atan/ pena ngan kasus , Monit oring dan evalu asi pena ngan an kasus , Fasilit asi penc egah an keker asan bagi PD, dunia usah a dan stake holde r, Need Asse	12 kal i, 5 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 1 kal i	130 .42 0.0 00	
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	-------------------------	--

								smen pere mpua n renta n/disa bilitas , Binte k SLRT , Pelati han usah a ekon omi produ ktif, pend ampi ngan GSIB, Rakor PPT korba n keker asan terha dap pere mpua n dan anak			
2	0	0			PROGR AM PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)						136 .35 0.0 00
2	0	0	2			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					

2	0	0	2	0				Ko ord ina si da n Sin kro nis asi Pel em ba ga an Pe me nu ha n Ha k An ak Ke we na ng an Ka bu pat en/ Kot a	Penin gkata n kapas itas Gugu s Tuga s KLA Tk.Ka bupat en, Penin gkata n jejarin g KLA, Pemb inaan KELA NA, Pemb entuk an DELA NA, Penin gkata n kapas itas Foru m Anak Kabu paten , Jamb ore Anak	4 ke g, 4 Ke g, 4 ke g, 30 de sa, 5 Ka li, 1 kali			
2	0	0						PROGR AM PERLIN DUNGA N KHUSUS ANAK					
												140 .45 7.0 00	

2	0	0	2			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
2	0	0	2	0			Ko ord ina si da n Sin kro nis asi Pe nce ga ha n Ke ker asa n ter ha da p An ak Ke we na ng an Ka bu pat en/ Kot a	Penc egah an Keker asan pada anak, Pener apan disipli n positif di sekol ah, TP A, 1 do ku me n, 13 0 or g, 3 Ke ca ma tan	1 ke g, 4 Ke c, 1 Ke g, 10 se kol ah, 12 TP A, 1 do ku me n, 13 0 or g, 3 Ke ca ma tan	140 .45 7.0 00	

										Pembentuk an PATB M			
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						392 .20 0.0 00	
2	1	0	2				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
2	1	0	2	1				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KK BP K	Rapat Kemitraan dengan Sektor Terkait, Rapat Koalisi Kependudukan, Rapat Kordinasi FAPS	3 0 PD /Le mb ag a, 2 kal i, 2 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 2 kal i	189 .70 0.0 00		

								EDU, Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan , Rapat Grand Design Kependudukan			
2	1	0	2				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
2	1	0	2	0			Penye- dia- an dan Pe- ng- ola- han Dat- a Ke- pe- nd- ud- uka- n	Peng- umpu- lan data, doku- men hasil analisis Data	12 bul- an, 12 do- k	177 .50 0.0 00	
2	1	0	2	0			Me- mb- ent- uk Ru-	Perse- ntase Pemb- uatan Ruma-	1 ka- mp- un- g	25. 000 .00 0	

2	1	0	2			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
2	1	0	2	0		Advokasi Program KKBP Kepadatan Stakeholder dan Mitra Kerja	Pameran program Hari Jadi Kab. Tegal, Pameran Film Program KKBP K, Rakor Pelayanan Integrasi, Penganangan Integrasi gerak PKK KB Kesehatan, Rapat Tim koordinasi Pengembangan kampung KB Tingkat	1 kali, 6 kali, 6 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 100 kade, 1 kali	110.000.000	

									at Kab. Tegal , Rapat Kons ultasi Tehni s Peng emba ngan Kamp ung KB Tingk at Kabu paten , Pelati han KIE bagi Kader PPKB D / Sub PPKB D, Penin gkata n kapas itas bagi PKB /PLK B				
2	1	0	2	0					Pel aks an aa n Me kan ism e Op	Biaya opera sional di Balai Peny uluha n	12 bul an	5.6 95. 144 .00 0	

							era sio nal Pro gra m KK BP K mel alui Ra pat Ko ord ina si Ke ca ma tan (Ra kor ca m), Ra pat Ko ord ina si De sa (Ra kor des , da n Min i Lok aka rya (Mi nilo k)				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							Biaya operasional pengolahan data, operasional PPKB D dan Sub PPKB D, Pertemuan kelompok kegiatan Tribina	12 bulan		
							Pelaksanaan rapat pokja, musyawarah desa, dan mini lokakarya di Kampung KB, Orientasi kader di kampung KB percontohan, Pen	6 kali, 3 kali, 3 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 paket		

								gada an medi a cetak KIE			
2	1	0	2					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			
2	1	0	2	0				Pe nye dia an Sar an a Pe nu nja ng Pel aya na n Kb	Peng adaa n tensi meter	24 uni t	40. 217 .00 0
									Peng adaa n Impla nt Remo val Kit	65 uni t	252 .91 7.0 00
									Peng adaa n Sepe da Motor Oprs PLKB (DAK)	45 uni t	987 .64 7.0 00

2	1	0	2	0				Pe mbi na an Pel aya na n Kel uar ga Ber enc an a da n Ke seh ata n Re pro duk si di Fa silit as Ke seh ata n Ter ma suk Jari ng an da n Jej ari ng nya	Pelay anan Safari KB, Pelay anan KB Integr asi Tingk at Kabu paten , Pelay anan Tk Keca mata n 18 Kec, Pemb elian Side Efek Pelay anan KB, Pelay anan Kega galan Kontr aseps i, Pelay anan Komp likasi Kontr aseps i	4 kal i, 7 kal i, 2 kal i, 12 50 stri p,3 ka su s, 10 ka su s	300 .50 0.0 00	
---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	-------------------------	--

2	1	0	2	0				Pro mo si da n Ko nse ling Ke seh ata n Re pro duk si, Ser ta Ha k- Ha k Re pro duk si di Fa silit as Ke seh ata n da n Kel om pok Ke giat an	Rapat koord inasi peng elola Progr am KKBP K bagi PLKB , Pemil ihan Duta GenR e, Sosia lisasi/ Tech nical meeti ng Duta GenR e, Rapat Pemb inaan Duta GenR e tk propi nsi, Rapat Sosia lisasi Saka Kenc ana perco ntoha n, Talks how GenR e, Sosia lisasi	1 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 1 kal i, 2 kal i, 2 kal i	53. 000 .00 0	
---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	------------------------	--

								PUP dan Pembinaan PIK R				
2	1	0	2					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
4	3	.04										
2	1	0	2	0				Peng uat an Per an ser ta Or ga nis asi Ke ma sya rak ata n da n Mit ra Ker ja Lai nny a dal am Pel	Jumla h tenag a pend ampi ng bina kelua rga yang dilatih , Jumla h kader BKR dan BKL Perco ntoha n yang dilatih , Jumla h Kader BKB yang	54 or an g, 54 or an g, 54 or an g, 54 or an g, 54 or an g, 1 uni t, 54 or an g	190 .00 0.0 00	

												aks an aa n Pel aya na n da n Pe mbi na an Ke ser taa n Ber - KB	dilatih tumb uh kemb ang anak, Jumla h kader UPP KS yang dilatih , Jumla h kader Pokja II dan IV PKK yang dilatih BKB Posy andu PAD U						
2	1	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											175	
	4	4																.00	
																		0.0	
																		00	
2	1	0	2	0									Ori ent asi da n Pel atih an Te kni s	Perse ntase peme nuha n saran a dan prasa rana bagi kelom	36				
	4	4	.0	3														175	
			1															.00	
																		0.0	
																		00	

							Pe ng elol a Ket ah an an da n Ke sej ah t era an Kel uar ga (B KB, BK R, BK L, PP PK S, PIK R da n Pe mb erd aya an Ek on omi Kel uar ga/ UP PK S)	pok kegiat an (BKB, BKR, BKL)			

Kepala
Dinas
P3AP2
dan KB

Kabupa
ten
Tegal

RETNO
SUPRO
BOWA
TL, SH,
MM,
M.Kn

NIP.
196011
01
198603
2 008

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2021. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Tegal secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal secara khusus maka Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Substansi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal 2019 – 2024
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2021 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021, sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 10 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal

Retno Suprobowati,SH, MM, M.Kn
NIP.19601101 198603 2 008

